

KRITIK TERHADAP KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI “NEOLIBERAL”

B. Kuspradono
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

This article explores neo-liberal economic development concepts on general and criticism on them in the form of alternatives provided. Actually, the concepts themselves have not been openly accepted by the World Bank and the IMF, while since 1990s both international financial institutions have been for several times forcing the application of the concepts in countries that received loan from the institutions. This topic becomes very important since Indonesia has experienced many economic policies which are forcefully driven or demanded by the IMF or the World Bank. Those kind of policies are, for instance, capital liberalization, trade liberalization, privatization, and structural adjustment program. Neo-liberal development concepts are based on liberal economy ideas only, which consist of free market profit and private asset ownership. The concepts have been applied to many developing countries in the form of structural adjustment program package.

Keywords: neo-liberal, structural adjustment, liberalization, economic development

1. PENDAHULUAN

Sejak akhir tahun 80-an muncul suatu strategi pembangunan “baru” yang tercermin dalam program kebijakan pembangunan dari IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia. Strategi pembangunan “baru” itu dengan jelas menunjukkan adanya Renaissance (kebangkitan kembali) pola pikir dari kaum liberal dalam teori ekonomi pembangunan. Strategi pembangunan “baru” itu berlandaskan pada dua orientasi: Orientasi *pertama* mengarah kepada suatu tuntutan untuk mengurangi keterbelakangan, baca kemiskinan. Artinya dibutuhkan suatu perubahan struktur yang tidak efisien. Caranya dengan menjalankan kebijakan penyesuaian struktural (*SAP= Structural Adjustment Program*). Orientasi *kedua* mengarah kepada penghindaran “eksternalitas negatif” yang tidak diinginkan oleh negara-negara industri (pemberi pinjaman). Jadi timbulnya “eksternalitas negatif” itu dianggap akibat dari perilaku negara-negara sedang berkembang (NSB). “Eksternalitas negatif” bisa berupa penembangan hutan tanpa diikuti reboisasi akan meningkatkan suhu bumi secara global dan migrasi orang-orang dari NSB ke negara-negara industri yang nantinya akan menjadi beban sosial bagi mereka. Pinjaman dari negara-negara industri ke NSB untuk pembangunan ekonomi dimaksudkan sebagai instrumen merubah preferensi, agar “eksternalitas negatif” dapat dikurangi. Tulisan ini akan memaparkan konsep pembangunan ekonomi ‘neoliberal’ secara umum berikut kritik-kritik yang di rangkum dalam bentuk alternatif-alternatif.

Sesungguhnya konsep itu sendiri belum pernah di-akui secara terbuka oleh Bank Dunia dan IMF, dimana kedua lembaga keuangan internasional sering « memaksakan » penerapan konsep itu sejak tahun 1990-an bagi negara-negara yang pinjam dana dari mereka. Tetapi, karena tema ini sangatlah penting, mengingat Indonesia telah sering menerapkan kebijakan ekonomi yang pada dasarnya di-tuntut/diminta IMF dan Bank Dunia. Kebijakan itu antara lain, liberalisasi modal, liberalisasi perdagangan, swastanisasi dan program penyesuaian struktural. Tulisan ini dibagi

dalam 5 bagian, bagian pertama pengantar dan bagian terakhir adalah penutup. Inti tulisan ini ada dalam tiga bagian. Bagian kedua membahas tentang Ide-ide ekonomi liberal yang mendasari konsep pembangunan neoliberal. Bagian ketiga membahas tentang aplikasi konsep itu sendiri di banyak NSB serta bagian keempat membahas alternatif kebijakan yang pernah diterapkan di banyak negara-negara sedang berkembang.

2. IDE-IDE EKONOMI LIBERAL

2.1. Pasar Bebas

Membuat dan merubah swasta untuk mendapat keuntungan merupakan titik sentral dari filosofi liberal. Menambah spesialisasi dan perubahan sukarela dalam pasar bebas atau terbuka dikatakan berkontribusi pada sebuah penggunaan efisien dari sumber daya dan untuk pertumbuhan ekonomi secara umum. Keuntungan dari pertumbuhan ekonomi nasional, dikatakan akan diteteskan (*trickle-down-effect*) pada semua lapisan masyarakat. Efisiensi ekonomi dikatakan akan meningkat dengan adanya kompetisi di *pasar bebas* tersebut – barang dapat dikenakan harga yang berlebihan atau memperbesar keuntungan ketika pesaing di dalam pasar bisa menawarkan produk yang sama pada harga lebih rendah. Contoh sederhana, sebuah pabrik *teh botol* baru yang sukses akan mendorong lebih banyak orang untuk menjadi konsumennya – konsumen baru ini akan membantu membayar untuk buruh dan karyawan baru – meningkatnya perdagangan ini akan membuat pabrik membeli botol kosong dari produsen lokal – dan supir pengangkut dan kernet akan mendapat penghasilan « *lebih* » dengan mengantar dari pabrik ke toko-toko pengecer – dan seterusnya. Persaingan dan motivasi untuk mendapat keuntungan akan berkontribusi pada terciptanya usaha dagang, dan juga untuk mengurangi biaya dengan menggunakan sumber daya (termasuk buruh) lebih efisien. Bagaimanapun *pasar bebas* dalam praktiknya lebih sering didominasi oleh pelaku besar, atau perusahaan raksasa [multinasional]. Ketika hal ini terjadi (*oligopoly* atau *monopoly*) efisiensi keuntungan dari persaingan cenderung untuk menghilang atau menciut. Misalnya, satu persaingan dan efisiensi pasar dapat ditemukan di pinggir-pinggir jalan raya pada pasar buah-buahan. Tetapi pasar untuk minyak, mobil, telekomunikasi, semen, energi listrik dan industri kompleks lainnya, biasanya didominasi oleh satu atau beberapa perusahaan besar, mereka mampu membuat keuntungan yang besar pula. Masih ada satu lagi, keuntungan dari pertumbuhan ekonomi nasional (contohnya Usaha dagang baru) sering tidak menetes seperti yang dikatakan oleh ekonom liberal. Beberapa orang mendapat lebih bahkan *berlebihan* dari yang lain, dan penyebaran dari keuntungan ini tergantung pada sistem sosial seperti *pajak usaha, infrastruktur, pelayanan, organisasi perdagangan dan undang undang perburuhan*.

2.2. Liberalisasi perdagangan

Telah lama dikenal, pernyataan seperti : Sama sama menguntungkan dari praktik perdagangan, dan kebanyakan negara dan banyak orang ingin berdagang. '**Perdagangan bebas**' bagaimanapun idenya adalah banyak negara menghilangkan sekat-sekatnya (misalkan: pembatasan impor, tarif bea masuk = pajak impor) pada impor, dan dengan dasar tersebut, adanya lebih banyak perdagangan, volume total dari pertukaran barang-barang dan jasa akan meningkat. Pada pandangan liberal, keuntungan dari pertumbuhan perekonomian nasional pada perdagangan akan "*menetes*" pada seluruh lapisan masyarakat. Pada abad 19, **David Ricardo** (yang mengkritisi Inggris tentang pajak pada gandum impor) mengembangkan ide tentang '*comparative advantage*' (perbandingan keuntungan) – bahwa setiap negara mempunyai struktur harga yang berbeda, yang menciptakan kesempatan untuk persamaan keuntungan dalam berdagang. Argumentasinya adalah, dari pada setiap negara mencoba memproduksi setiap kebutuhannya, lebih baik memproduksi barang unggulannya dan memperdagangkannya. Para ekonom di abad duapuluh kemudian mengembangkan model matematis untuk mendemonstrasikan

bagaimana mengembangkan spesialisasi dan perdagangan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional – keuntungan yang akan menetes dsb.

Pada jangka pendek, kita bisa melihat keuntungan dari sebuah negara yang berspesialisasi pada produk unggulannya. Bagaimanapun pada jangka panjang, harga harga internasional untuk kebanyakan komoditi pokok (seperti kopi tadi) adalah “**lemah**”. Tahun ini satu unit televisi bisa diperdagangkan -misalkan saja- ekuivalen dengan 100 kilogram kopi – tahun depan bisa menjadi 110 kg kopi. Kemunduran akan harga harga dari kebanyakan komoditi pokok (kecuali minyak) terhadap harga harga barang barang pabrik, di jelaskan pertama oleh ekonom Amerika latin **Raoul Prebisch** pada tahun 50-an dan disebabkan oleh (1) persaingan antara banyak produsen kecil terutama dari nega berkembang (2) Adanya komoditas pengganti untuk berbagai komoditas (mis. Nilon untuk benang, teh untuk kopi) dan (3) Semakin baiknya pendapatan memperbanyak permintaan untuk barang barang pabrik – adalah ketika orang meningkat pendapatannya, mereka cenderung untuk membelanjakan uangnya pada barang barang pabrik (mobil, elektronik dll), daripada untuk barang barang pokok (beras, buah buahan, kopi). Jadi masalah untuk NSB adalah bahwa mereka menghadapi naiknya pembayaran barang barang pabrik yang semakin meningkat, dengan semakin cepatnya penurunan harga harga komoditas pokok. Sementara setiap negara yang telah kaya (dari Jerman, Jepang sampai Singapura) telah melakukan hal tersebut dengan melebarkan ‘perbandingan keuntungannya’ dengan menambah keanekaragaman dan melakukan industrialisasi. Proses untuk menambah keanekaragaman dan melakukan industrialisasi ini akan sulit jika satu negara terlalu ‘terkunci pada’ perkiraan tentang ‘perbandingan keuntungan’. NSB perlu satu strategi untuk mengembangkan dan memperbaiki kapasitas produksinya, jika mau keluar dari kemiskinan. Seperti juga teori liberal mengemukakan keperluan akan hal ini.

Akan tetapi bagaimana sebuah NSB melakukan industrialisasi dan mengembangkan keanekaragaman produk? Ada satu pendekatan alternatif adalah industri ‘kelompok pembangunan’, yang sekarang sedang dipromosikan oleh UNCTAD (United Nations Commission on Trade and Development). Hal ini dicomot dari teori ‘tumpukan penyebab’ (*‘cumulative causation’*), yang menekankan hubungan dan koordinasi antara industri-industri pada regional tertentu. Kemungkinan contoh yang paling baik untuk kesuksesan ‘kelompok pembangunan’ di sebuah negara berkembang adalah terciptanya industri teknologi informasi di **Banglore India selatan**. Banglore sekarang mempunyai sebuah ‘jaringan padat dan terinterkoneksi yang terjalin didalam dan diantara teknologi tinggi permesinan, elektronik, telekomunikasi, pertahanan dan sektor alat alat mesin serta institusi lokal (pendidikan dan pelatihan)’ (UNCTAD 1998: 10). Ini terjadi melalui sejumlah koordinasi pemerintah pusat dan operasi perusahaan swasta dari USA, termasuk beberapa konsorsium.

2.3. Liberalisasi modal

Para ekonom ‘*pasar bebas*’ terdahulu tidak memperkirakan derasnya pergerakan modal seperti sekarang ini. Tetapi pasca periode Perang Dunia II, para pemikir ekonomi liberal berargumentasi bahwa pergerakan modal bebas membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi umum, karena modal akan ‘secara alami’ tertarik menuju kecepatan pengembalian(modal) tertinggi, dan ini berarti penanaman modal akan ditaruh pada penggunaan penggunaan yang paling efisien. Seperti pada semua aspek lain dari model model liberal, level tertinggi dari aktivitas ekonomi diperkirakan mewakili perbaikan pada kesejahteraan, dan pertumbuhan umum diperkirakan untuk ‘menetes’ pada semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu meniadakan segmentasi pada pergerakan modal (semua negara mempunyai kontrol tertentu terhadap investasi asing, untuk bermacam tujuan sosial) adalah bagian dari model pembangunan ekonomi liberal. Dalam kenyataannya, pasal pertama dari konstitusi Bank Dunia mempersyaratkan “ mempromosikan penanaman modal asing swasta”. Cara paling positif untuk melihat pada teori liberalisasi modal adalah bahwa memindahkan beberapa kontrol sosial

terhadap penanaman modal swasta asing bisa membawa pada arah permodalan baru (penanaman modal lapangan hijau) – yaitu, penanaman modal yang menciptakan industri yang sama sekali baru di satu negara. Pada banyak kasus (dengan perkiraan industri baru cocok secara sosial) seperti investasi baru yang menciptakan tenaga kerja dan pendapatan baru. IMF dalam program penyesuaian strukturnya (structural adjustment programs- SAPs) mempersyaratkan, bahwa negara-negara yang bermasalah dengan valuta asing agar menaikkan tingkat suku bunga, untuk menarik minat modal asing yang melihat pada kesempatan deposito bank. Jenis penanaman modal ini bukan penanaman modal langsung [modal jangka pendek atau *hot money*], dan bisa ditarik hanya dengan pemberitahuan singkat. Bagaimanapun modal jangka pendek bisa menolong memegang nilai sebuah mata uang lokal, hanya modal asing harus berbentuk mata uang kuat (misalkan: US dolar) terhadap mata uang lokal, untuk membuat penanaman modal jangka pendek di suatu negara. Bagaimanapun, dalam pasar modal global sekarang ini, kurang dari 5% dari semua aliran modal adalah ‘investasi asing langsung’ (FDI - foreign direct investment) dan kurang dari 5% dari semua FDI adalah ‘lapangan hijau’ atau investasi baru (UNCTAD 2000). Yaitu, kebanyakan aliran modal adalah modal jangka pendek dan kebanyakan FDI di dunia pada akhir-akhir ini telah merger (bergabung) dan diakuisisi – 90% dari ini diantara Eropa dan Amerika. Modal jangka pendek yang terdorong oleh liberalisasi modal, bisa jadi menolong memegang nilai mata uang lokal – tetapi juga mendorong aktivitas *spekulasi* dan mengurangi kestabilan ekonomi. Pada 1997 Krisis moneter di sebagian negara Asia telah mengambil bagian dari efek ketidakstabilan atas Hedge fund (dana investasi bersama-swasta), spekulasi terhadap mata uang, dan pelarian modal besar-besaran yang terjadi ketika hancurnya nilai mata uang (mis. Bath – Thailand, Rupiah dll). Mantan kepala ekonomi Bank Dunia **Joseph Stiglitz** (seorang pendukung *liberalisasi perdagangan*) mengatakan: “Tidak pernah ada bukti ekonomi dari liberalisasi pasar modal. Masih belum ada. Hal itu hanya menambah resiko dan tidak menambah pertumbuhan...(kebijakan ini) semua berdasarkan pada ideologi.” Stiglitz mengundurkan diri dari Bank Dunia (yang berkomitmen terhadap liberalisasi kapital) sesaat setelah membuat pernyataan ini.

2.4. Swastanisasi

Ekonom liberal sering memperdebatkan kebaikan dari *swastanisasi* – penjualan perusahaan dan aset-aset dari negara. Perdebatan politik umum yang ada adalah perusahaan swasta lebih kreatif dan bekerja lebih efisien daripada birokrasi yang mengantuk, malas dan bahkan sering korupsi. Bagaimanapun para ekonom liberal mengatakan bahwa ini kompetisi, lebih dari pada swastanisasi, yang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi. Contohnya di Jerman, ‘kebijakan kompetisi’ mempunyai lebih banyak pendukung intelektual dibanding dengan swastanisasi. Namun begitu, swastanisasi lebih populer secara politik karena perusahaan besar meminta akses pada kesempatan investasi baru (perusahaan publik yang produktif) dan politikus mengambil keuntungan jangka pendek melalui pendistribusian penjualan aset. Bank Dunia pada laporannya tahun 1995, kalangan Bisnis mengatakan bahwa proporsi keseluruhan dari perusahaan milik negara secara internasional tidak berkurang dalam 20 tahun terakhir, meskipun *suatu pertumbuhan konsensus bahwa performa pemerintah tidak lebih baik dari sektor swasta dalam menjalankan aktivitasnya* dan meskipun ada usaha-usaha untuk melepaskan selama dua dekade terakhir (World Bank 1995: 2). Bank Dunia, menginginkan untuk mempromosikan kesempatan investasi asing langsung secara internasional untuk perusahaan multinasional, termasuk bank bank multinasional, tidak sabar dengan apa yang dilihat sebagai kemajuan yang lambat dalam usaha untuk membuka kesempatan swastanisasi.

Namun swastanisasi bergandengan tangan dengan sosialisasi – selama pemerintah menanggung perusahaan besar (terutama bank bank dan perusahaan asuransi) atau mensubsidi perusahaan besar yang terancam untuk pindah keluar. Pembangunan ganda ini telah menarik kritik yang mengatakan bahwa pemerintah dalam masyarakat kapitalis cenderung untuk

‘**menswastakan keuntungan dan mensosialisasikan kerugian**’ dari ekonomi. Contohnya, ada tekanan yang besar untuk menswastakan satu perusahaan yang menguntungkan dan berproduksifitas yang tinggi seperti Telkom di Indonesia. Namun pada saat yang sama Pemerintah Indonesia mengucurkan triliunan rupiah untuk menanggung (bail out) bank bank,

Pada krisis moneter Asia, IMF meminta Pemerintah Indonesia, Thailand untuk menswastakan semua perusahaan milik negaranya, dan menggunakan hasilnya (setelah membayar semua kewajiban untuk semua pekerja yang di PHK) untuk melambungkan kembali sektor perbankan negara. **Hal ini mewakili sebuah subsidi besar negara terhadap intitusi keuangan yang menjadi akar dari krisis** tersebut. Meskipun demikian Pemerintah Indonesia dan Thailand yang menginginkan untuk menerima keuangan IMF, mengumumkan bahwa swastanisasi akan meningkatkan efisiensi, menjaga perusahaan publik dalam keuangan luas yang seimbang, memperbaiki pemerintahan dan menarik penciptaan aliran modal non-hutang’ (IMF 1997a: 3). Pemerintah Indonesia dan Thailand berjanji bahwa negara akan:”*mengurangi perannya dalam ekonomi masa datang secara nyata.....* negara akan memelihara satu peran operasi hanya untuk perusahaan yang beroperasi startegis, wajib secara sosial atau non-komersil pada alam, namun yang perlu dipertimbangkan untuk kualitas hidup dari warga negara masing-masing. Bagaimanapun swastanisasi Indonesia dan Thailand dilawan dengan dasar bahwa mereka mewakili sebuah pemindahan aset publik kepada perusahaan keuangan swasta, bahwa ini ‘menanggung’ sebuah ‘*resiko moral*’ dimana bisnis keuangan tidak akan menarik pelajaran dari kegagalannya, dan bahwa swastanisasi akan mengarah pada dominasi asing. Ekonomi liberal mengatakan bahwa **swastanisasi** terutama adalah masalah efisiensi dan pentingnya membangun kembali struktur. Bagaimanapun kritik mengatakan bahwa swatanisasi dikemukakan oleh kepentingan-kepentingan kekuatan tertentu, yang mengantisipasi dengan mengambil keuntungan dari proses swastanisasi – seperti, membeli aset publik pada harga murah. Swastanisasi pada beberapa negara belakangan ini [contohnya seperti Rusia, Indonesia, Thailand, Bangladesh) telah ditandai oleh seriusnya skandal korupsi.

3. Kebijakan ekonomi neoliberal

Bank dunia merupakan lembaga keuangan multilateral utama yang terlibat dengan NSB. Ditekankan bahwa tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan, akan tetapi sebagai cara utama dalam pencapaian tujuannya tersebut adalah liberalisasi kapital, sehingga layak untuk mempelajari tentang ide-ide Bank Dunia secara detail.

Bagian ini membicarakan (a) Program-program Penyesuaian Struktural Bank dunia, tetapi setelah tahun 1999 diberi nama ‘Strategi Pengentasan Kemiskinan - Poverty Reduction Strategies) dan (b) catatan Bank dunia tentang pengentasan kemiskinan di negara-negara miskin, (c) Pandangan Bank Dunia tentang ‘**good governance**’, atau politik dan regulasi hubungan ekonomi (d) masalah penting tentang ‘*food security*’ di NSB, dan pandangan Bank Dunia tentang hal ini, dan (e) pertanyaan tentang apakah (atau untuk maksud apa) Bank Dunia berubah.

3.1 Structural Adjustment Programs

SAPs dikaitkan dengan pinjaman dari IMF dan Bank dunia, khususnya sejak krisis utang pada awal 1980-an (mis: Argentina, Mexico, Brazil, Ghana, Nigeria), akan tetapi juga di Eropa Timur dan selama krisis moneter Asia sejak tahun 1997 (Thailand, **Indonesia**, Korea Selatan). SAPs menerapkan persyaratan-persyaratan pada pinjaman *hard currency* jangka pendek (IMF) atau pinjaman dengan jangka lebih panjang (Bank Dunia). Gabungan dari persyaratan yang sama, termasuk penelitian yang cermat dan mendetail tentang semua kebijakan pemerintah, akan diperkuat lewat perjanjian, ‘*letter of intent*’ dan pemberian dana pinjaman secara bertahap. Persyaratan ini secara tipikal mencakup:

1. Penghilangan subsidi harga dan pengendalian harga
2. Pemotongan tarif dan kontrol perdagangan yang lain.

3. Devaluasi sesegera mungkin terhadap mata uang, dan pembebasan atas pengendalian pertukaran mata uang asing
4. Peningkatan industri untuk ekspor
5. Tingkat suku bunga tinggi, untuk mencegah inflasi dan menarik modal asing
6. Pengurangan pelayanan pemerintah dan menggantinya dengan 'penyediaan pelayanan oleh swasta' dan kerjasama publik-swasta pada beberapa prasarana.
7. Swastanisasi badan usaha milik negara yang menguntungkan.

Bentuk alasan untuk suatu SAP adalah untuk mengembalikan sinyal harga kepada pasar dan menciptakan kondisi menguntungkan untuk investasi swasta asing dan memperluas perdagangan. IMF juga beralasan bahwa suatu SAP diperlukan untuk stabilisasi dan mengembalikan kapasitas pendapatan mata uang asing. Bank Dunia juga beralasan bahwa SAP mewujudkan kebijakan yang baik dan diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, perkembangan dan pengentasan kemiskinan, dan kebanyakan tujuan-tujuan sosial lain. Apapun yang IMF dan Bank Dunia katakan tentang pengentasan kemiskinan, partisipasi, **gender**, keamanan pangan atau hak asasi manusia, mereka menawarkan cara yang sama untuk mencapai tujuan tersebut – memperluas modal swasta asing dan liberalisasi perdagangan internasional. Organisasi-organisasi ini berlawanan dengan investasi publik, dan penciptaan lembaga ekonomi publik, dan regulasi harga untuk tujuan sosial. Kebijakan yang diminta di bawah suatu SAP banyak memiliki kesamaan seperti yang diminta oleh : Pinjaman lunak Bank Dunia, International Development Association (IDA), skema buyout utang dari Bank Dunia untuk negara-negara miskin pengutang berat (HIPC Debt Initiative) dan penyusunan program untuk negara-negara dalam transisi ekonomi (yang sebelumnya sosialis). Sebagai contoh, Program Bank Dunia 1998 untuk Vietnam mencakup pengendalian anggaran, swastanisasi, liberalisasi perbankan dan liberalisasi perdagangan. Tujuan Bank Dunia (1998) : “Untuk membantu Vietnam mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan untuk menciptakan transisi yang lancar menjadi ekonomi pasar dengan memperkuat stabilitas makro ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, Structural Adjustment Credit (SAC) ditujukan untuk empat bidang prioritas : (1) manajemen fiskal, (2) perusahaan negara, (3) sektor keuangan, dan (4) kebijakan perdagangan asing. Pada bulan September 1999, Bank Dunia dan IMF mengganti nama SAPs menjadi ‘Strategi Pengentasan kemiskinan’ (Poverty Reduction Strategies-PRSs). Meskipun demikian World Development Movement (2001) di London menyimpulkan bahwa isi kebijakan dari PRSs “tidak menunjukkan perubahan besar dari masa lalu” dan bahwa ini adalah “kekhawatiran khusus ditujukan pada bukti yang mendasar yang menunjukkan SAPs tidak mengurangi kemiskinan”. IMF mengganti nama “Enhanced Structural Adjustment Facility” mereka menjadi “Poverty Reduction and Growth Facility”, akan tetapi laporan tahun 2001 dari US General Accounting Office kepada US Congress menyimpulkan bahwa program baru IMF tersebut “sedikit berbeda dari program sebelumnya”

3.2. Pengentasan kemiskinan

Bank dunia mengakui bahwa pengentasan kemiskinan adalah tugas ‘pembangunan’ utama dunia. “Pada awal dari abad baru, kemiskinan menjadi masalah global dengan proporsi besar. Dari 6 milyar penduduk dunia, 2,8 milyar hidup dengan kurang dari \$2 sehari dan 1,2 milyar dengan kurang dari \$1 sehari. Delapan dari setiap 100 bayi tidak hidup untuk merayakan ulang tahunnya yang ke lima”. (World Bank 2001)

UN’s Development Program (UNDP) juga menunjukkan bahwa 60% dari 4,4 milyar penduduk di NSB tidak memiliki akses untuk air minum yang bersih dan aman, penduduk miskin pedesaan adalah 80% dari penduduk miskin di NSB dan tingkat kemiskinan berkisar dari 30% hingga 60% di NSB. Argumentasi utama telah diajukan terhadap cara yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan. Karena Bank Dunia sangat berkomitmen terhadap liberalisasi modal, evaluasinya terhadap program pengentasan kemiskinan lebih sering ditujukan pada cara ini dari pada hasil

yang sesungguhnya. Sebagai contoh saja, pada peneluhannya atas bantuan kepada Bolivia, Bank Dunia (1998) menyatakan posisi standar ekonomi liberal :

“Pertumbuhan yang lebih cepat dan luas, kunci untuk pengentasan kemiskinan, hanya dapat dicapai melalui pengembangan sektor swasta. Bank harus membantu Bolivia untuk menghilangkan hambatan dari pemerintah dan lembaga yang ada terhadap pengembangan sektor swasta dan melanjutkan pengembangan pasar modalnya”. Pada saat yang sama, Presiden Bank Dunia Wolfensohn telah dipaksa untuk mengakui bahwa Kuba, sebuah negara dengan pengaturan pasar swasta yang tinggi dan dengan hati-hati mengendalikan investasi swasta, memiliki indikator sosial yang jauh lebih baik daripada kebanyakan negara-negara nasabah Bank Dunia. Meskipun secara kasat mata sebagai ‘anti-model’ dari pengembangan dalam lingkaran Bank Dunia, Kuba telah melakukan sebuah “hasil kerja yang bagus dalam pendidikan dan kesehatan” pengakuan Wolfensohn (Lobe 2001). Kuba memiliki sistem perawatan kesehatan terbaik di Amerika Latin, walau demikian program Bank Dunia bahkan tidak memberikan kemungkinan dari negara-negara untuk belajar dari Kuba. Juga pada saat yang sama, sejumlah penelitian yang signifikan telah menyatakan bahwa liberalisasi modal ‘structural adjustment’ sesungguhnya memperburuk kemiskinan di negara-negara miskin. Sebagai contoh, peneliti Cheru (1989), Khan (1993) dan Watkins (1999) telah menyatakan bahwa SAPs dari IMF dan Bank Dunia telah memperburuk kemiskinan dan kondisi sosial, dan telah merusak demokrasi. Bank Dunia telah dengan keras melawannya, dengan penelitiannya sendiri yang selalu mencari hubungan pengembangan pasar swasta dengan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, karena keprihatinan yang meluas tentang pengaruh yang merugikan dari SAPs, Bank Dunia pada tahun 1996 menerima tantangan dari ORNOP untuk menyusun suatu ‘Structural Adjustment Participatory Review Initiative’, yang melibatkan enam negara di bawah SAPs. Pada laporan baru-baru ini dari penelaahan ini Bank Dunia (2001) menelaah penelitian tentang SAPs, tidak ada dari setengah dari laporan menemukan SAPs telah memiliki pengaruh buruk terhadap kemiskinan. Separuh yang lain (kebanyakan ditulis oleh staff Bank Dunia) adalah baik tidak meyakini atau menemukan bahwa SAPs efektif berhubungan dengan perbaikan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan. Contohnya Weeks (1997) telah sangat kritis terhadap metodologi yang dipakai untuk kajian empiris dari satu dari studi-studi positif ini). Meskipun kisaran positif ditempatkan pada semua penelitian tentang SAPs (“di banyak negara-negara SAPRI, tujuan luas dari reformasi makro ekonomi telah dicapai”), Bank Dunia mengakui bahwa “pengaruh buruk secara potensial tampak pada beberapa negara-negara SAPRI”. Pengaruh-pengaruh buruk ini mencakup : pengurangan pegawai pemerintah dan pengeluaran atas pelayanan sosial dan naiknya harga bahan pangan yang “dengan keras memukul penduduk miskin” (World Bank 2001:39) Kritik yang lebih netral terhadap structural adjustment lebih jauh dari ini. Laporan kepada Komisi Hak Asasi Manusia UN, Fantu Cheru (1999) menyimpulkan bahwa negara-negara di bawah SAPs “telah cukup banyak menyerahkan kedaulatannya kepada IMF dan Bank Dunia”. SAPs mencakup ‘liberalisasi secara paksa’ dan dampak yang paling mendasar adalah “pada peran negara dalam pengembangan nasional.....negara tidak lagi bertindak sebagai buffer terhadap ekonomi dunia, tetapi memainkan peran yang terpadu dalam memfasilitasi globalisasi” (Fantu 1999). IMF dan Bank Dunia tidak sama sekali mempercayakan pemerataan tingkat pertumbuhan untuk mengurangi kemiskinan (lewat ‘trickle down effect’). Cheru menunjukkan bahwa beberapa studi dari Bank Dunia dan IMF telah menemukan bahwa meskipun tingkat pertumbuhan kelompok di negara di bawah SAP dapat lebih rendah dari negara yang tidak di bawah SAPs (studi IMF untuk 1973-1988) dan di Sub-Sahara Afrika “Pinjaman adjustment dari Bank Dunia belum secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan memiliki sumbangan kepada penurunan yang signifikan secara statistik dalam rasio investasi” (studi World Bank 1992 dalam Fantu 1999). SAPs juga memberi tempat istimewa pada efisiensi, produktifitas dan kelompok-kelompok yang terlibat dalam ekspor.... pada pembiayaan kebebasan sipil dan pemerintahan sendiri”. (Fantu 1999). Pada tahun 1991, Laporan Khusus UN tentang Diskriminasi terhadap Minoritas, Mr. Danilo Turk, menemukan bahwa SAPs

membahayakan hak untuk bekerja, untuk pangan, untuk perumahan, untuk kesehatan, untuk pendidikan dan untuk pembangunan (Turk 1991 dalam Cheru 1999). Structural adjustment di Afrika telah membebani mereka yang bergantung pada investasi domestik dan pelayanan pemerintah (Turk dalam IDIC 1993). Cheru (1999) menambahkan bahwa SAPs memberi tambahan pada penindasan terhadap hak buruh, pada perusakan asset lingkungan dan pada pelebaran rentang penghasilan “ketika persentase penduduk miskin telah mendekati dua kali lipat di banyak negara yang menerapkan SAPs, bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk yang paling kaya meningkat dengan tajam selama 15 tahun terakhir” (Cheru 1999). Sejumlah ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) monitoring yang mengawasi SAP di banyak negara dan menemukan bahwa proses swastanisasi SAP telah menyumbangkan peningkatan pengangguran dan ketidak-amanan pekerjaan, melemahkan hak-hak pekerja dan meningkatkan biaya pelayanan sementara kualitas pelayanan merosot secara signifikan. Dalam beberapa kasus, pelayanan yang telah diswastanisasi telah menjadi lebih tidak efisien dari pada perusahaan publik. Sama dengan hal tersebut, kebijakan permodalan SAP dan liberalisasi perdagangan telah melemahkan **sektor pertanian**, berdampak negatif terhadap pekerja perempuan dan pekerja tidak trampil dan memperburuk ketidak setaraan. Tingkat yang lebih tinggi dari penganiayaan terhadap hak-hak buruh, kemerosotan upah riil dan peningkatan ketidaksetaraan telah dikaitkan dengan pergeseran menjadi fleksibilitas pasar kerja yang lebih besar. Pembiayaan sektor publik dipotong dan naiknya ongkos kepada pengguna telah merusak akses terhadap perawatan kesehatan, pendidikan dan perumahan terhadap kelompok miskin dan yang tidak diuntungkan (SAPRIN 2000). Kemiskinan dan indikator keadaan kritis sosial lainnya sulit untuk dibuatkan grafik di negara-negara miskin, di mana pengumpulan data secara sistematis hanya sedikit dilakukan. Akan tetapi dengan kecenderungan global untuk peningkatan secara bertahap terhadap harapan hidup (rata-rata peningkatan 10% antara awal tahun 1970-an dan akhir 1990-an), terasa menyakitkan bahwa sejumlah negara-negara di bawah SAPs bukan hanya tidak mengalami peningkatan akan tetapi sesungguhnya mengalami penurunan harapan hidup. ‘Structural adjustment’ jangka panjang terasa hanya melakukan sedikit hal untuk membantu kecenderungan yang mengerikan di negara-negara ini. Eropa Timur adalah tempat di mana kegagalan **kebijakan neoliberal** paling dapat didemonstrasikan. Dalam transisi menuju ekonomi ‘pasar’, kebanyakan penduduk di bekas negara-negara sosialis ini telah kehilangan akses yang aman terhadap kebutuhan hidup dasar. Kemerosotan harapan hidup yang menyedihkan di Rusia dan sebagian besar Eropa Timur mencerminkan kecenderungan yang sama dalam hal bertambah buruknya kesehatan, pendidikan dan peningkatan kemiskinan.

3.3 Pemerintahan yang bersih

Tahun-tahun terakhir ini, Bank Dunia telah menambahkan “**Good Governance**” pada daftar kebijakannya. Hal tersebut setelah secara luas ditemukan keluhan-keluhan tentang ketidak bertanggungjawaban dan korupsi di negara-negara yang dibantu oleh Bank Dunia. Tentu saja, pendanaan Bank Dunia sendiri memberikan sumbangan yang besar terhadap korupsi. Sebagai contoh di Indonesia di bawah Rejim Suharto, hingga 30% dari Dana Bank Dunia diperkirakan telah di-gelap-kan. Meskipun demikian ‘governance’ dalam pikiran yang lebih luas berarti politik dan regulasi terhadap kegiatan sosial dan ekonomi, dan perlu untuk dimengerti pandangan neoliberal Bank Dunia terhadap konsep luas ini. Bank Dunia sekarang mengatakan bahwa ‘**Good Governance**’ telah menjadi hal yang penting dalam evaluasinya dan persyaratan untuk pendanaan negara, dan bahwa ini memiliki empat komponen utama: [1]. lembaga publik yang kompeten dan bertanggungjawab, [2]. kebijakan yang praktis dan transparan, [3]. kerangka kerja hukum dan [4]. perundangan yang stabil dan dapat diprediksi dan partisipasi dari kelompok-kelompok yang berpengaruh dan masyarakat sipil (Bank Information Centre 2001). Program yang ditujukan pada korupsi telah juga dikembangkan. Meskipun demikian, pandangan Bank Dunia tentang ‘governance’ adalah konsep luas di mana kegiatan perusahaan swasta mendominasi kehidupan

ekonomi, dan pemerintahan memiliki peran yang khusus dan telah ditetapkan – termasuk untuk meningkatkan kondisi untuk modal swasta, dan untuk menswastakan asset sosial. Dalam kenyataannya, ‘good governance’ mencakup negara-negara [termasuk Indonesia] yang mengikuti kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh Bank Dunia dan IMF. Untuk memahami pandangan Bank Dunia tentang ‘good governance’, kita perlu mengenali bahwa Bank Dunia memandangnya sebagai perusahaan besar yang mendominasi pengambilan keputusan ekonomi. Memang perusahaan swasta memiliki bentuk pertanggungjawaban yang berbeda untuk pemerintahan yang terpilih. Dalam kenyataannya, pendekatan Bank Dunia terhadap ‘good governance’ cenderung kabur ke dalam pandangannya sendiri atas ‘corporate governance’ – wilayah di mana Bank Dunia melaksanakan pelatihan substansial. Program pelatihan Bank Dunia dalam ‘corporate governance’ menekankan pada peran keuangan, kekuasaan multinasional dan peran sektor swasta terhadap pusat dari ‘governance’ dalam masyarakat kontemporer. Tantangan untuk ‘governance’ ini dalam meningkatnya borderless world termasuk kebutuhan untuk memperkenalkan tindakan untuk kesuksesan usaha, memperoleh tanggung jawab dari ‘stakeholder’ dan dapat bertanggungjawab kepada ‘shareholder’. Perusahaan harus kreatif dan memiliki visi jangka panjang yang mencakup perhatian terhadap pengurusan dan pengelolaan. Pertanggungjawaban adalah kepada ‘owner’ (yaitu pemegang saham swasta) tetapi pengurusan melibatkan kemampuan komunikasi, mempertahankan reputasi dan pengembangan hubungan dengan ‘stakeholder’ (yaitu kelompok masyarakat yang berpengaruh) (King 2001). Peran Pemerintah dalam pandangan yang lebih luas tentang ‘governance’ menurut Bank Dunia, adalah untuk mengembangkan ‘program reformasi’ menekankan kompetisi yang sesuai dan regulasi kebijakan (memberikan investor swasta akses ke pasar baru, dan mengurangi kekuasaan monopoli terhadap sarana publik), swastanisasi perusahaan milik negara [BUMN]—Bank Dunia sering bersikap bermusuhan terhadap birokrat dalam BUMN--, menemukan cara baru untuk melibatkan investor swasta dalam penyediaan pelayanan dan reformasi hukum perundangan untuk memperbaiki operasional pasar (contoh pengembangan hak milik, hak cipta, paten). Sebagai contoh, kursus jarak jauh Lembaga ‘Good Governance’ World Bank (2001a) mengajarkan pemerintah, perusahaan dan kelompok konsumen bagaimana berargumentasi untuk “pembukaan” sistem telekomunikasi publik di Philipina. Tidak ada pelatihan tentang keuntungan mempertahankan telekomunikasi sebagai sarana publik dan mempertahankan tujuan sosial dan budaya. Tindakan melawan korupsi karenanya hanyalah bagian kecil dari pandangan luas tentang ‘governance’. Bahkan dalam bidang korupsi, Bank Dunia memiliki pandangan yang kompromistis, karena perlunya kerahasiaan dan terlibatnya pengambilan keuntungan dalam operasi komersial swasta. Tindakan anti-korupsi yang efektif, sesuai Transparency International (2001) mensyaratkan “*perhatian dan keterlibatan pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha*”. Walaupun demikian, kerahasiaan komersial dan mekanisme pertanggungjawaban terbatas dari perusahaan swasta secara serius tidak memperbolehkan keterlibatan tersebut. Transparency International juga menunjukkan bahwa ‘good governance’ pada tingkat global amat sangat kurang. Bank Dunia dan IMF beroperasi dengan sedikit masukan demokratis, sering kali menerapkan kebijakan dari atas ke bawah (top down), dan sering kali mengurangi kapasitas pemerintah yang dipilih secara demokratis untuk mengambil keputusan dalam suatu keterbukaan, partisipasi dan sikap yang bertanggungjawab. Argumentasi ‘good governance’ oleh Bank Dunia karenanya adalah model yang mbingungkan dan mencurigakan.

3.4 Keamanan Pangan

Keamanan Pangan berarti mempertahankan kapasitas yang dimiliki suatu *populasi* untuk memberi makan dirinya sendiri, bahkan dalam keadaan ekonomi yang sedang turun. Dalam banyak hal, ini berarti memperkuat produksi domestik dan kapasitas mencukupi untuk petani miskin, yang merupakan bagian terbesar penduduk miskin di NSB. Kemampuan mencukupi kebutuhan sendiri harus dicapai dan dijamin sebelum mempertimbangkan perdagangan internasional. Walau demikian untuk lembaga ekonomi liberal, seperti halnya Bank Dunia dan

WTO, perdagangan internasional dan investasi dinyatakan sebagai lebih penting, karena hal ini memberi sumbangan pada pertumbuhan ekonomi. Di Timor Lorosae, sebagai contoh, Bank Dunia telah menyusun argumentasi standarnya bahwa “Keamanan pangan, bukan kemampuan mencukupi pangan sendiri, harus menjadi orientasi dari pembicaraan tentang kebijakan” (World Bank 2000a:61). Dalam konteks ini, Bank Dunia mengatakan bahwa Timor Lorosae tidak perlu bertujuan mencukupi diri sendiri dalam produksi beras, akan tetapi lebih terfokus pada penanaman kopi untuk ekspor (East Timor’s ‘comparative advantage’). Bank Dunia juga menentang persediaan beras yang disimpan dalam lumbung-lumbung masyarakat, mengatakan lebih baik menyediakan dana penyangga untuk membeli beras impor dan, bila perlu atau memungkinkan, pemberian ‘safety net – jaring pengaman’ untuk penduduk miskin sehingga mereka dapat membeli makanan (World Bank 2000:61). Meskipun demikian, sebagian besar penduduk miskin tahu bahwa jaring pengaman mereka yang terbaik adalah menanam padi di daerahnya sendiri. Peneliti Keamanan pangan Aileen Kwa (2000) mengatakan bahwa *“solusi perdagangan terhadap keamanan pangan mungkin adalah sebuah teori yang baik akan tetapi merupakan resep untuk bencana dan ketidakamanan pangan bagi penduduk miskin pedesaan”*. Perdagangan mungkin meningkatkan kemakmuran akan tetapi juga mengurangi keamanan. Bahkan untuk negara makmur seperti Inggris Raya, Lang and Hines (1993:94) mengajukan alasan, perdagangan dalam jumlah besar terhadap bahan makanan pokok dan pengganti adalah “menggelikan” dan percuma. Penulis tentang pembangunan telah menekankan berkali-kali bahwa perdagangan membutuhkan konteks sosial, dan ini merupakan hal yang kritis dalam melindungi hajat hidup petani kecil. Menentang pernyataan orthodox tersebut, Bank Dunia mengatakan bahwa keamanan pangan harus dicapai lewat liberalisasi perdagangan, dan peningkatan teknologi pertanian. Bank Dunia memberikan dana pinjaman yang hanya tersedia bila produsen mengganti produksinya dari bahan pokok (yakni jagung dan gandum) menjadi tanaman yang memiliki ‘nilai tambah’ ekspor. Bank Dunia telah memperkuat pengendaliannya terhadap pola perdagangan NSB lewat pertaliannya dengan rezim IMF dan WTO (Kwa 2001). Seperti halnya WTO, rezim pertanian bersubsidi di Uni Eropa dan Amerika Serikat secara kasat mata tidak terjangkau, sementara produksi pertanian di negara miskin secara buruk dihantam oleh kebijakan modernisasi dan structural adjustment. Sebagai contoh, di bawah suatu rezim structural adjustment Bank Dunia, Bangladesh telah memperlihatkan masukan pertanian yang lebih mahal (pupuk, benih paten dan irigasi), harga pertanian yang stagnan dan pencabutan subsidi terhadap penduduk miskin. Di depan muka petani yang marah, Pemerintah Bangladesh telah dipaksa untuk bertindak jahat mempertahankan sektor pupuk swasta dengan pemalsuan dan penipuan (SAPRIN 2000). Hal yang sama terjadi di Ghana, di bawah structural adjustment dari Bank Dunia, terjadi penurunan produksi pangan domestik, pengurangan keamanan pangan bagi penduduk miskin, penurunan investasi pertanian dan memperlebar perbedaan antara produsen pangan untuk ekspor dengan domestik (SAPRIN 2000). Di WTO, NSB mengambil tindakan yang berbeda-beda dalam keamanan pangan dan liberalisasi perdagangan. Dengan 70 juta penduduk yang bergantung pada pertanian, India paling kuat menekankan keamanan pangan. India bermaksud untuk mempertahankan tarif tinggi untuk tanaman pangan pokoknya (beras, gandum dan jagung), melaksanakan tindakan perlindungan pertanian khusus untuk negara berkembang pada saat krisis, mempertahankan skema dukungan pertanian domestik tetapi menghilangkan subsidi ekspor terhadap pertanian (Kwa 2000). Terdapat perbedaan pendapat yang lebar di dalam negara-negara ASEAN, dengan Thailand yang terdekat pada ‘kelompok makanan’ dari eksportir pertanian (termasuk Australia), yang menginginkan liberalisasi pertanian yang lebih penuh dan universal. Indonesia, di pihak lain, menunjukkan bahwa perdagangan beras dunia adalah 30 juta ton, sedangkan Indonesia sendiri mengkonsumsi 20 juta ton. Indonesia menginginkan pembatasan yang lebih rendah untuk pertanian di Amerika Serikat dan Uni Eropa, akan tetapi yakin bahwa Perjanjian WTO tentang Pertanian seharusnya memperbolehkan negara-negara berkembang untuk mempertahankan tindakan dukungan domestik (Kwa 2000).

Sementara argumentasi untuk akses pasar yang lebih besar untuk barang-barang manufakturnya di dunia, baik pemerintah Uni Eropa dan Amerika Serikat telah secara konsisten dan dengan keras mensubsidi pertaniannya. Pangan hanya dicantumkan dalam perjanjian GATT terakhir, tahun 1994, akan tetapi tidak banyak yang berubah. Dan jelas bahwa keamanan pangan juga merupakan suatu masalah bagi negara-negara makmur. Jepang berkomitmen untuk mempertahankan produksi berasnya sendiri yang sangat mahal. Dan Departemen Pertanian Amerika Serikat, dalam penjelasan yang rasional untuk rentangan pertanian dan program dukungan penghasilannya, menyatakan bahwa tahun 1999 sebanyak tiga juta orang Amerika “kelaparan” sedangkan 10% dari rumah-rumah di Amerika (kurang lebih 30 juta orang Amerika) dalam “ketidakamanan pangan” (ERS 2001). Organisasi UN untuk Pangan dan Pertanian (FAO) menemukan bahwa keamanan pangan adalah masalah besar global. Hampir satu milyar penduduk di seluruh dunia adalah “kekurangan pangan yang kronis”, dan “perlu dilakukan tindakan yang giat dan terarah” untuk memastikan bahwa “cukup pangan tersedia dan penyediaannya relatif stabil dan bahwa mereka yang membutuhkannya bisa mendapatkannya” (FAO 2001). Akan tetapi cara apa yang akan digunakan untuk mencapai keamanan makanan? Lembaga ekonomi liberal yang utama (WTO, IMF dan World Bank) mendukung tindakan liberalisasi perdagangan dan investasi.

3.5 Apakah Bank Dunia “bisa” berubah

Bank Dunia menyatakan bahwa mereka mendengarkan kritik, dan mereka telah melakukan perubahan terhadap banyak kebijakan mereka sebelumnya.

“Prioritas Bank Dunia telah berubah secara dramatis. Pada tahun 1980, investasi dalam sektor tenaga kerja diperkirakan merupakan 21 persen dari pinjaman bank. Saat ini, hal tersebut turun hingga 5 persen. Sebaliknya, pinjaman untuk kesehatan, nutrisi, pendidikan dan perlindungan sosial tumbuh dari 5 persen pada tahun 1980 menjadi 25 persen saat ini. Bank Dunia, yang dimiliki 183 negara, juga melaksanakan pembangunan dengan cara yang berbeda, dan ditujukan pada masalah-masalah seperti gender, pembangunan swadaya masyarakat, dan penduduk pribumi”. (World Bank 2001d). Jelas sekali bahwa World Bank sejak pertengahan 1990-an ke depan, di bawah President James Wolfensohn, telah merubah bahasanya, dan usaha yang dilakukannya untuk menyelaraskannya dengan kritik-kritik ORNOP. Sebagian dari perubahan penekanan ini membuat beberapa analis (misalnya Bello 2001) menjadi yakin bahwa Wolfensohn memiliki masa depan yang terbatas di bawah President Amerika Serikat yang baru George W. Bush. Sementara pemerintahan Clinton mendukung liberalisasi Bank Dunia di bawah Wolfensohn, menilainya sebagai kelanjutan tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, pemerintahan Bush, sebagian merasa baik IMF dan Bank Dunia adalah kegagalan yang mahal, dan perbankan komersial biasa dapat melakukan stabilisasi dan pengembangan kapitalis dengan lebih baik.

Jauh di dasar bahasa Wolfensohn yang progresif, kritikus tetap menangkap bahwa program Bank Dunia mempertahankan orientasi ‘pasar bebas’nya. Jelas, aturan Bank Dunia belum berubah, hal ini membuat bank tersebut memfasilitasi investasi asing swasta pada setiap kesempatan. Meskipun liberalisasi modal bukan satu-satunya cara memandang pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Malapetaka Eropa Timur tahun 1990-an lah yang membawa Bank Dunia pada ketidaksepahaman yang paling mencolok untuk kerusakan dan mencerminkan secara luas akan kegagalan liberalisasi modal. Mantan Senior Vice President dan Chief Economist **Joseph Stiglitz**, pernah menjadi Guru Besar Ekonomi di Princeton, Yale dan Oxford dan sebagai penasihat kepada Presiden Amerika Serikat Clinton, sebelum ia bergabung dengan Bank Dunia di pertengahan 1990-an. (Pada tahun 2001 Stiglitz menjadi penerima Haidah Nobel untuk Ekonomi). Begitu menelaah ‘**shock therapy**’ IMF dan Bank Dunia yang membawa malapetaka di Eropa Timur pada akhir 1990-an, Stiglitz mulai menantang apa yang dikenal dengan nama ‘Konsensus Washington’. Pada tahun 1999, ia menyatakan Eropa Timur dalam keadaan lebih buruk setelah satu dekade dalam ‘reformasi pasar bebas’ dari pada selama di bawah komunisme tahu 1989.

Stiglitz mengatakan : “*Hampir tanpa pengecualian, negara-negara ini telah kembali ke tingkat PDB mereka tahun 1989.... Lebih mengganggu lagi, kita menyaksikan penurunan dramatis yang sama dalam indikator sosial. Harapan hidup turun pada 18 dari 25 negara-negara tersebut yang datanya kita miliki [dan] kemiskinan meningkat dari 4% menjadi 45% dari jumlah penduduk*” (Executive Intelligence Review 1999).

Stiglitz juga dengan blak-blakan memberi komentar atas dampak kebijakan structural adjustment IMF yang diterapkan di Thailand, Korea Selatan dan Indonesia, setelah krisis keuangan Asia 1997. Tindakan IMF dalam pemotongan pengeluaran publik dan peningkatan suku bunga dikatakan sebagai “*psikologi buruk dan ekonomi yang lebih buruk.... Anda mengajukan pertanyaan ‘Siapa yang sed*

ang anda lindungi?’ Anda sedang melindungi perusahaan yang sedang berjudi [pada nilai mata uang]. Siapa yang membayarnya? Pekerja yang akan anda keluarkan dari pekerjaannya? (Executive Intelligence Review 1999). Stiglitz telah dipaksa keluar dari Bank Dunia di akhir 1999, setelah reaksi kemarahan atas kritiknya dari mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat Lawrence Summers. Tetapi Stiglitz tetap melanjutkan kritiknya “*Tidak pernah ada bukti secara ekonomi akan kebaikan liberalisasi pasar modal.* Masih belum ada. Hal itu meningkatkan resiko dan tidak meningkatkan pertumbuhan... [kebijakan ini] tidak lain berdasarkan atas ideologi”. Stiglitz mendukung seruan pendemonstrasi global untuk partisipasi pekerja dan penduduk dalam pembuatan keputusan ekonomi. “Negara-negara harus berani mencapai konsensus nasional, untuk menciptakan strategi mereka sendiri untuk pembangunan”, katanya (Moberg 200b). Kerusakan lain di tahun 2000 juga memalukan Bank Dunia. Ahli ekonomi terkemuka Ravi Kanbur, pimpinan penulis World Development Report 2000, mengundurkan diri setelah apa yang dia pandang sebagai tekanan tanpa alasan untuk menenggelamkan bagian dari World Development Report atas dampak globalisasi (Bretton Wood Project 2000). Bank Dunia tetap memiliki masalah besar dengan kritik dari dalam tentang liberalisasi modal. Bank Dunia juga memiliki masalah besar dengan ketetapanannya sendiri dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akhirnya Bank Dunia juga memiliki masalah besar dengan pendekatan hak-hak azasi manusia atas perkembangan ekonomi. Bank Dunia masih secara struktural dan ideologi diatur oleh komitmennya untuk mewajibkan liberalisasi modal.

4. Alternatif – Alternatif untuk ‘pembangunan’ neoliberal

Apakah tidak ada alternatif lain untuk pembangunan neoliberal (liberalisasi perdagangan, liberalisasi modal dan swastanisasi) seperti yang diusulkan oleh Bank Dunia dan IMF? Jawabannya sederhana adalah ADA. Dan kebanyakan sudah dicoba dan bisa berjalan.

Pertama, adalah penting untuk mengenali bahwa kebijakan-kebijakan alternatif ini dipandang untuk memiliki posisi yang berbeda di dalam pandangan strategis yang berbeda tentang **pembangunan Ekonomi**, yang secara luas dapat dijelaskan sebagai berikut :1. **Demokrasi sosial** – mencoba memperluas demokrasi pada semua bidang dalam kehidupan sosial dan ekonomi.2 **Kesetaraan sosial**– yang menitikberatkan pada kendali kolektif atau sosial dari lembaga ekonomi yang utama.3. **Gerakan warga negara global** – yang mencari arah untuk meng-globalisasikan hak asasi manusia, untuk menandingi globalisasi kekuatan perusahaan.Kedua, adalah penting untuk mengenali perbedaan antara kebijakan ‘stabilisasi’ (kebutuhan untuk menstabilkan harga, nilai tukar mata uang dan lingkungan ekonomi secara umum) dan ‘penyesuaian struktural’ (perubahan-perubahan jangka panjang, yang menurut Bank Dunia harus melibatkan liberalisasi modal). Walaupun pembuat kebijakan mungkin mempunyai beberapa pilihan tentang stabilisasi, hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki pilihan tentang penyesuaian struktural.Berikut ini adalah beberapa pilihan yang mungkin dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat, bersama dengan beberapa masalah yang berhubungan dengan alternatif-alternatif tersebut.

4.1. kebijakan industri dan perdagangan yang adil

Walaupun beberapa tingkatan liberalisasi perdagangan mungkin diperlukan untuk memperluas peluang perdagangan, liberalisasi perdagangan mungkin juga bertrok dengan dua tujuan sosial penting lainnya – keperluan untuk menganekaragamkan dan meningkatkan kapasitas-kegiatan produksi, dan keperluan untuk mengekspresikan solidaritas kepada para pekerja dan lainnya yang hak-haknya dilanggar. Alternatif pertama untuk liberalisasi perdagangan adalah kebijakan industri, yang sering didasarkan pada kelompok pembangunan sedangkan alternatif yang kedua adalah suatu bentuk dari perdagangan yang adil. Kelompok pembangunan industri adalah satu dari beberapa cara yang dapat digunakan oleh NSB untuk meningkatkan “*keuntungan komparatif*”-nya, daripada tetap terjerat dalam pola *produksi lama*. Pada dasarnya, hampir seluruh negara kaya [industri maju] telah melalui proses industrialisasi yang cukup lama. Ada sebuah keuntungan jangka pendek dalam memproduksi apa yang dapat dikerjakan lebih baik oleh satu pihak, yaitu melalui spesialisasi, tetapi dalam jangka panjang hal ini dapat melemahkan ekonomi NSB. Alternatifnya adalah ‘kelompok pembangunan’ industri, yang didasarkan pada teori ‘penyebab kumulatif’ (cumulative causation), yang menekankan pentingnya pembangunan hubungan antara industri, pendidikan, penanaman modal dan lembaga-lembaga penunjang. United Nations Commission on Trade and Development (UNCTAD) sekarang menunjuk kepada kelompok pembangunan dan jaringan kerja dari perusahaan kecil dan menengah [UKM] sebagai salah satu bentuk pembangunan dan pembentuk keterampilan yang menjanjikan. Mungkin model kelompok pembangunan yang paling sukses pada saat ini adalah pembangunan industri teknologi tinggi di Bangalore, India. Di sini telah ada sebuah “jaringan yang padat dan saling terkait di dalam dan di antara sektor teknik teknologi tinggi, elektronik, telekomunikasi, pertahanan dan alat-alat mesin dan lembaga lokal (pendidikan dan latihan)” (UNCTAD 1998:10). Pembangunan di Bangalore dapat terlaksana melalui pengambilan keputusan yang strategis dan penanaman modal yang penting dari Pemerintah India Tengah, termasuk penanaman modal di industri pertahanan dan pendirian sekolah-sekolah teknik. Para insinyur Bangalore telah berhubungan dengan penemuan-penemuan teknis yang terus-menerus dan koordinasi antara pelaksanaan publik dan swasta telah menjurus ke beberapa perkongsian. Contohnya, kelima pabrik pembuat alat-alat mesin telah membuat alat-alat pengganti dari alat-alat saingannya, dan ada kerjasama dalam skala besar di bagian produksi, penjualan dan pekerjaan sub-kontrak. Namun tidak semua kelompok meningkatkan teknologi dan membangun jaringannya. Beberapa kelompok berada pada posisi yang sama atau malah menurun. Walaupun begitu perusahaan-perusahaan individual dapat bekerjasama dalam bidang strategi dengan pemerintah pusat dan daerah. Menurut UNCTAD, indikator pelaksanaan yang penting adalah: tingkatan teknologi, keterampilan, penemuan, kepercayaan, kerjasama, persaingan, ukuran perusahaan, ekspor dan proses belajar. Sebuah pembangunan teknologi yang lebih rendah adalah kelompok pembuat peralatan bedah di Sialkot, Pakistan. Di sini sebuah kelompok yang sangat kompetitif yang terdiri dari 300 pembuat peralatan bedah menerima bantuan yang berarti dari negara dalam bentuk koordinasi ekspor, dukungan kualitas, laboratorium pengujian logam, pelatihan teknis dan pinjaman lunak. Sebuah kegagalan kualitas telah mengakibatkan penurunan keadaan ekonomi di pertengahan tahun 1990-an, namun sejak tahun 1997 industri tersebut telah bangkit kembali dengan keadaan kualitas dan penjualan yang telah diperbaiki melalui beberapa kemitraan dengan luar negeri (UNCTAD 1998:12-13). Tetapi industri ini tercoreng oleh penggunaan tenaga kerja anak yang telah terlanjur lazim dilaksanakan.

Dengan meliberalisasikan perdagangan dan pengglobalisasian produksi, sekarang terdapat beberapa masalah untuk hak-hak pekerja, karena penanam modal terkemuka internasional dan hak-hak pedagang telah mengambil alih peraturan ketenagakerjaan. Hal ini pada umumnya menjadi sebuah isu yang ditimbulkan oleh serikat pedagang di negara-negara kaya (yang peduli akan erosi pekerjaan dan industrinya) tetapi hal itu juga penting untuk pekerja di NSB jika mereka mencari dukungan internasional untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaannya. Gerakan “*Hukum Sosial*” adalah satu upaya pada “perdagangan yang adil” –

gerakan ini ditujukan untuk menghubungkan hak-hak pekerja yang “mendasar” (hak untuk mengorganisasikan, melarang pekerja anak dan pekerja paksa, non-diskriminasi) untuk perjanjian perdagangan, khususnya melalui berubahnya WTO. Namun ada beberapa model “perdagangan yang adil” lainnya yang menitikberatkan hubungan solidaritas yang lebih langsung antar negara. Lalu apa artinya perdagangan yang berkeadilan? Dan apa hubungannya dengan hak-hak pekerja? Ketentuan pergerakan sosial ingin agar memenuhi perjanjian ‘pokok’ International Labour Organisation (ILO) menjadi sebuah syarat dalam perdagangan yang menjadi pilihan dalam WTO. Namun banyak anggotanya yang berasal dari negara berkembang mengkhawatirkan bahwasanya WTO didominasi oleh negara-negara adikuasa, hal ini mungkin saja bisa menjadi suatu alat untuk melindungi industri-industri dan ketenagakerjaan di negara kaya, seperti Amerika Serikat. Bentuk-bentuk lain dari “perdagangan yang adil” termasuk kelompok pemerintah dan masyarakat yang beraksi untuk membatasi perdagangan yang menguntungkan perusahaan-perusahaan tertentu yang melanggar hak-hak asasi manusia. Perbedaan antara perlindungan gaya lama dan “perdagangan yang adil” pastilah terletak pada tingkatan solidaritas yang murni dan komunikasi diantara pergerakan warga negara dan pekerja yang tersebar di berbagai negara.

4.2. Pengendalian modal

Dengan kepergian mantan Wakil Presiden Bank Dunia, Joseph Stiglitz, ia melaporkan bahwa liberalisasi modal sebagai penambah resiko tanpa memberi sumbangan kepada pertumbuhan: *“Tidak pernah ada bukti akan keuntungan dari liberalisasi pasar modal. Sampai saat ini masih belum juga ada.* Hal tersebut meningkatkan resiko dan tidak meningkatkan pertumbuhan. Apakah kalian pikir (pembela liberalisasi) akan mengatakan kepada saya pada saat ini bahwa “Anda belum membaca kesepuluh hasil studi ini” tetapi mereka belum pernah mengatakannya, karena tidak ada satupun.. Kesemuanya itu didasarkan pada ideologi” (Stiglitz di Moberg 2000a)

Mempertahankan atau memperluas Pengendalian modal merupakan langkah yang tidak populer pada perusahaan-perusahaan besar, Bank Dunia dan IMF – tetapi hal tersebut telah dilaksanakan tanpa mengusir semua penanaman modal swasta. Alasan utama untuk hal ini adalah bahwa para penanam modal terlihat lebih menghargai akses menuju pasar dari pada konsesi di dalam pasar itu sendiri. Pengendalian modal jatuh ke dalam dua kategori pokok – peraturan pergerakan-pergerakan modal jangka pendek (‘uang panas’) dan peraturan atau koordinasi penanam modal langsung. Di dalam kategori yang pertama, alternatif liberalisasi yang paling populer adalah usulan pengenaan ‘**Tobin Tax**’ untuk transaksi valuta asing, sedangkan pada kategori yang kedua terdapat contoh-contoh suksesnya pengelolaan modal swasta melalui peraturan langsung dan usaha patungan.

‘**Tobin Tax**’ adalah sebuah usulan yang dikemukakan oleh ekonom Amerika Serikat James Tobin pada akhir tahun 1970-an, dan sekarang didukung oleh lebih dari 700 anggota parlemen di seluruh dunia (Tobintaxcall 2001), untuk membebaskan pajak yang jumlahnya sangat kecil (kurang dari satu persen) pada semua transaksi valuta asing. Pajak ini akan memiliki dampak yang tidak terasa kepada pergerakan modal untuk penanaman modal riil dan tujuan-tujuan perdagangan, namun akan dapat memperlambat pergerakan yang terlalu cepat dari spekulasi modal (‘uang panas’) yang mencari keuntungan pada fluktuasi pasar valuta asing harian dan pasar-pasar lainnya. Perlambatan pergerakan dari destablisasi dan modal jangka pendek yang tidak produktif ini dapat membantu menstabilkan lingkungan ekonomi. Keuntungan dari pajak ini di masa yang akan datang dapat dipergunakan untuk beberapa tujuan sosial. Pengendalian modal telah diperkenalkan di Malaysia di tengah-tengah Krisis Keuangan Asia dan hal ini telah mejadi suatu masalah kontroversial. Pengendalian ini dengan pahit dilawan oleh IMF dan ekonom keuangan ortodoks (seperti Miller 1999, Hartwell 2001) namun hasil-hasilnya cukup bagus. Pada September 1998, di tengah-tengah Krisis Asia, Pemerintahan Malaysia menarik kursnya dari

peredaran internasional (membuatnya menjadi tidak dapat ditukar), kurs pertukaran tetap pada 3,8 Ringgit terhadap USD dan mengizinkan pengembalian penanaman modal dan keuntungan oleh para penanam modal hanya setelah 12 bulan. Pada tahun 1999, jangka waktu 12 bulan ini sudah tergantikan oleh 'exit tax' yang besarnya 10%. Pada bulan Mei 2001, penanaman modal ini dihapuskan, tetapi Pengendalian pertukaran valuta asing tetap dipertahankan. Bagaimana ekonomi Malaysia bertahan di bawah sistem ini? Mungkin analisa yang paling baik datang dari para analis di Federal Reserve Amerika Serikat (Edison dan Reinhart 2000), yang menyimpulkan bahwa Pengendalian sementara yang dijalankan oleh Malaysia menyumbangkan stabilitas suku bunga dan valuta asing, dan kepada kebijakan otonomi, tanpa suatu bukti yang merugikan ekonomi. Pada suatu negara lain yang juga merupakan negara sosialis, seperti Kuba, pada pertengahan tahun 1990-an bentuk perdagangan 'usaha patungan' telah menjadi suatu alat yang menarik penanaman modal swasta terkendali untuk masuk ke pasar yang baru. Setelah runtuhnya hubungan perdagangan dengan Uni Soviet dan Eropa Timur, Kuba mengalami depresi ekonomi yang serius (1990-93) dan dipaksa untuk mencari sumber-sumber penanaman modal yang baru. Foreign Investment Act 1995 yang dimiliki oleh Kuba dan perubahan hak milik di bawah Undang-Undang Dasar Kuba 1992 telah mengizinkan pembentukan beberapa buah usaha patungan, khususnya dengan perusahaan-perusahaan dari Eropa Barat, Kanada, Meksiko dan Brazil. Jumlah yang cukup banyak pada penanaman ini terdapat di bidang kepariwisataan, yang meledak sejak awal tahun 1990-an, berkembang lebih cepat (15-20% pertahun) dibandingkan dengan kepariwisataan di negara-negara Karibia lainnya. Di tahun 2000 sekitar 20% penanaman modal di bidang pariwisata didapat dari perusahaan asing. Usaha patungan telah terlihat juga pada industri lampu dan otomotif. Contohnya, ada usaha patungan tekstil, industri-industri sepatu dan plastik, juga dengan kerjasama di bidang produksi bus dan truk Bank Sentral Kuba, sebagai tambahan dari pelaksanaan fungsi-fungsi tradisional bank sentral (mengawasi bank-bank lain, mengendalikan kurs dan kebijakan keuangan) mengatur penyaluran tabungan ke aktivitas-aktivitas yang produktif dan membatasi kredit yang didasarkan pada analisa resiko Foreign Investment Act 1995 membebaskan pajak yang jumlahnya cukup tinggi pada usaha patungan ini – 30% pajak pendapatan dan 14% pajak tenaga kerja (untuk mendukung sistem keamanan sosial). Namun tarif ini dapat ditoleransi. Jadi, Pengendalian modal dan koordinasi penanaman modal dapat berjalan, tanpa mengusir penanam modal swasta, karena penanam modal asing sering pragmatis dan menilai akses ke pasar lebih dari suatu posisi dari keistimewaan mutlak di dalam lingkup pasar tersebut.

4.3. lembaga-lembaga publik

Pandangan-pandangan neoliberal menyatakan bahwa swastanisasi asset dan lembaga-lembaga publik akan membawa pada penanaman modal yang lebih besar, sebuah penggunaan yang efisien atas sumber daya (jika terdapat persaingan), dan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan umum ekonomi. Namun usulan-usulan ini paling sering datang dari negara-negara kaya, yang pada satu sisi, perusahaan-perusahaan besar yang "lapar" akan penanaman modal internasional baru, dan pada sisi lainnya, lembaga-lembaga publik tersebut jumlahnya cukup banyak. Kebanyakan NSB memiliki sedikit lembaga publik yang oleh masyarakat di negara-negara kaya disia-siakan – sebagai contohnya, perpustakaan umum, sekolah-sekolah menengah dan universitas-universitas yang merupakan swadaya masyarakat, sistem-sistem komunikasi dan transportasi yang swadaya masyarakat atau bersubsidi, rumah sakit umum, pola asuransi kesehatan publik, dan sistem keamanan sosial swadaya masyarakat berskala besar. Akan tetapi kegagalan dan korupsi yang merajalela pada banyak usaha yang telah terswastanisasi telah memaksa pemikiran ulang swastanisasi di banyak negara. Kematian listrik pada sistem kelistrikan yang telah diswastakan di California pada awal tahun 2001 membawa negara bagian itu untuk kembali kepada kepemilikan dan pengelolaan jaringan. Korupsi yang merajalela pada sektor pupuk yang telah diswastakan di Bangladesh (pemalsuan dan penipuan) telah memalukan

Pemerintahan Bangladesh dan menyakitkan banyak petani kecil (SAPRIN 2000). Dan perusahaan pelayanan-pelayanan komputer EDS, yang mana kepadanya Pemerintahan Australia Selatan memberikan subkontrak kerja semua pelayanan teknologi informatika pada tahun 1995, telah ditemukan oleh pemeriksa lepas meminta bayaran sebesar 10 juta dolar Australia lebih banyak dari yang seharusnya kepada Pemerintah Australia Selatan tersebut (Altmann 2001: 5). Jadi, dalam banyak kasus, swastanisasi tidak menghasilkan pelayanan yang aman, efisiensi yang lebih besar atau megurangi “masalah” bagi pemerintah. Beberapa kebijakan swastanisasi telah diputarbalikkan, atau dikesampingkan. Pada saat negara bagian California berurusan kembali dengan penanganan kelistrikannya, sejumlah pemberontak yang terdiri dari orang-orang miskin di Cochabamba, Bolivia, telah memutarbalikkan rencana swastanisasi air. Kota Cochabamba diberitahu oleh Bank Dunia pada tahun 1996 bahwa mereka tidak akan mendapatkan sumber-sumber pembangunan pengairan kecuali melalui sistem swastanisasi pengairan. Kelanjutan dari Kontrak kepada International Waters Limited (anak perusahaan dari perusahaan raksasa konstruksi Bechtel) mengakibatkan kenaikan harga yang luar biasa, untuk menutupi biaya keuangan pembuatan dan proyeksi keuntungan bendungan IWL. Keluarga-keluarga miskin dengan pendapatan kurang dari seratus dolar per bulan membayar tagihan air bulanan yang mencapai duapuluh dolar (Right to Water 2000). Sebuah protes yang besar di bulan April 2000 (di mana beberapa orang mati dan banyak yang terluka) memaksa Pemerintahan Bolivia untuk mundur, memerintahkan IWL/Bechtel untuk keluar dari negara tersebut dan mencabut rencana-rencana swastanisasi pengairannya. Selanjutnya Bank Dunia mencoba untuk menjauhkan dirinya dari tawaran dan proyek bendungan IWL, dan dari rezim peraturan Pemerintahan Bolivia (Global Exchange 2000).

Pada saat Pemerintahan Bolivia mengambil alih kembali pelayanan pengairannya di Cochabamba, di Filipina telah diusulkan pelaksanaan cooperative buy-outs (“co-oprivation”) atas prasarana pengairan yang telah diswastakan, berkenaan dengan timbulnya kenaikan harga air yang berarti (Diokno Pascual et al. 2001). Pengkampanye Kanada, Maude Barlow, menelusuri lebih jauh, berargumentasi bahwa sebuah ‘kesamaan global’ dari pelayanan-pelayanan strategis, seperti air, seharusnya dikelola untuk kepentingan khalayak umum, dan tidak dikomoditaskan seperti yang diceritakan diatas. (Barlow 1999). Di Selandia Baru, di mana Pemerintahan Partai Buruh mengizinkan swastanisasi dari kebanyakan industri sektor publik (bank, kereta api, prasarana) di tahun 1980-an, pemerintahan Partai Buruh yang baru, yang kecewa atas buruknya pelayanan dan tingginya harga, kembali menghampiri sektor-sektor publik tersebut. Selandia Baru telah kembali mengambil alih kendali atas stasiun televisi nasional, TVNZ (Scoop 2001). Dan sekarang terdapat usulan-usulan dari pemerintah untuk me-renasionalisasi-kan People’s Bank yang telah diswastakan, dan kampanye umum untuk me-renasionalisasikan beberapa jaringan kereta api milik negara (Freedland 2001). Dari pada melakukan renasionalisasi, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk mempertahankan kendalinya atas kebanyakan sektor pelayanan yang penting dan asset publik tersebut. Modal swasta tambahan dapat diikutsertakan dalam usaha patungan. Seperti yang telah saya kemukakan di atas (4.2.) keberhasilan yang sederhana dari penanaman modal usaha patungan di negara sosialis Kuba. Keadaan serupa terjadi di Republik Rakyat Cina yang berkata kepada IMF dan Bank Dunia bahwa “segala upaya akan dilaksanakan untuk mengembangkan aneka ragam bentuk kepemilikan yang pada waktu yang bersamaan memastikan adanya posisi dominan atas kepemilikan publik” (Zongli 1997). Mempertahankan dan mengelola modal publik pada industri-industri strategis akan dapat menjadi isu yang besar baik untuk negara kaya maupun juga untuk negara berkembang.

4.4. Modal publik

Walaupun neoliberal membicarakan tentang swastanisasi dan non-intervensi, di negara-negara kaya subsidi-subsidi sosial yang merebak sekarang mengalir ke perusahaan-perusahaan besar.

Pada pertengahan tahun 1990-an studi untuk Pemerintah Australia mengidentifikasi 5.7 milyar dolar Australia pada subsidi pemerintah untuk industri-industri sumberdaya alam (Environment Australia 1996) dan 15.8 milyar dolar Australia pada subsidi pemerintah untuk semua industri (Industry Commission 1998). Sebagai tambahan, pada tahun 2001 Australia melihat penjaminan Pemerintah Federal untuk bank-bank besar, perusahaan-perusahaan asuransi, industri daerah pedalaman dan perusahaan penerbangan. Pada setiap kasus sebuah perusahaan besar telah diberikan subsidi yang banyak, dengan menggunakan dasar pemikiran bahwa kesehatan operasional perusahaan akan memberi keuntungan yang dapat diberikan kepada kalangan masyarakat yang lebih luas. Namun tidak dalam satupun kasus terdapat adanya ganti rugi dalam bentuk modal (saham) bagi masyarakat sebagai pengganti subsidi tersebut. Bagaimanapun mengapa masyarakat tidak mendapat bagian keuntungan dari perusahaan yang telah mereka subsidi, manakala operasinya kembali dijalankan? Para pemimpin politik di Australia yang mungkin dapat menjadi kritis akan kecenderungan ini telah terintimidasi oleh argumentasi kalangan neoliberal terhadap ‘sosialisasi’, atau penanaman modal publik, bahwa modal publik sebagai ganti dari subsidi publik belumlah menjadi isu-isu politik yang besar. Namun hal itu akan terjadi. Modal publik dapat menjadi ‘harga’ dari sebuah perlindungan dan subsidi publik. Sama halnya pada NSB, di mana pemerintah-pemerintahnya dapat menawarkan keuntungan untuk perusahaan-perusahaan asing yang besar – konsesi pajak, perizinan operasi dan akses terhadap sumber daya, pasar dan infrastruktur – modal publik (kepemilikan saham) pada usaha strategis dapat dengan mudah menjadi ‘harga’ dari sebuah penanaman modal yang baru. Negara-negara seperti Papua Nugini, contohnya, telah meraih kepemilikan saham pada usaha pertambangan, sebagai ganti dari pemberian izin-izin penambangan. Pengaturan yang serupa dapat diberlakukan terhadap bank atau operator-operator telekomunikasi, yang dengan diberikannya izin sebetulnya telah diberikan hak-hak monopoli di negara-negara kecil. Kepemilikan publik dan beberapa mengatakan dalam kebijaksanaan (contohnya subsidi silang, perlindungan lingkungan) dapat dengan mudah menjadi ‘harga’ untuk akses ke pasar yang baru.

5. SIMPULAN

Pandangan liberal telah lama dikenal seperti pasar terbuka dan kompetisi, keuntungan dari bersaing, perdagangan bebas, skedul permintaan dan penawaran dan kedaulatan konsumen. Kesemua ini akan menimbulkan masalah, bila dalam kenyataan tidak pernah eksis. Pasar yang bersaing tinggi memang ada, seperti pasar buah dan ikan, tetapi tidak di industri. Di industri yang rumit kebanyakan dikuasai perusahaan besar, dimana persaingan yang “normal” sama sekali tidak terjadi. Selain dari itu, masih banyak terdapat manipulasi pasar yang dilakukan produsen dan harga-harga masih banyak ditentukan mekanisme penawar. Kebanyakan program SAPs yang di telah terapkan mengalami kegagalan seperti di tunjukan oleh beberapa penelitian empiris. Alternatif pembangunan yang di bahas di bagian keempat merupakan suatu jalan tengah sebagai upaya menyelesaikan masalah kemiskinan di NSB.

DAFTAR PUSTAKA

Altmann, C. , (2001), “IT Giant found overcharging again”, *The Australian*, 3 October, p.5.

Bank Information Centre, (2001), “Who is Governing the Governors? Globalisation, Governance and Democracy”, *Bank Information Centre*, di-download dari www.bicusa.org/ptoc/, September.

- Barlow, M. , (1999), Blue Gold: the global water crisis and the commodification of the world's water supply, *International Forum on Globalisation*, Toronto.
- Bello, W. , (2001), "George W. Bush, James Wolfensohn and the World Bank", di-*download* dari www.focusweb.org.
- Cheru, F. , (1999), "Effects of structural adjustment policies on the full enjoyment of human rights", UN Commission on Human Rights, 55th session, review by independent expert, 24 February.
- Environment Australia, (1996), Subsidies to the Use of Natural Resources, NIEIR for DEST, Canberra.
- ERS, (2001), "Food Security in the United States", Briefing Room, Economic Research Service, US Department of Agriculture, di-*download* dari www.ers.usda.gov/briefing/foodsecurity/.
- Executive Intelligence Review, (1999), "World Bank's Stiglitz: Shock Therapy Failed", di-*download* dari www.aboutsudan.com/issues/debt/shock_therapy_failed.htm, July 16, p.50
- FAO, (2001), "Special Programme for Food Security: Objectives and Approach", Food and Agriculture Organisation, di-*download* dari www.fao.org/spfs/objec-e.htm.
- Fernandez, José H. , (2000), "Renovation Continues in the Cuban Banking System", Business TIPS on Cuba, Vol 7 No 9, September, Technological Information Promotion System (TIPS).
- Freedland, J. , (2001), "Privatisation stops here", www.theage.com.au/news/2001/02/FFXNR2UQ8JC.html.
- Global Exchange, (2000), "Water Privatisation in Bolivia", June 6, di-*download* dari www.globalexchange.org/wbimf/Schultz.html.
- Hartwell, C. , (2001), "The Case Against Capital Controls", Cato Policy Analysis No 403, di-*download* dari www.cato.org/pubs/pas/pa-403es.html, June 14.
- IMF, (2001), IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Governors, September 27 ,2001, di-*download* dari <http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#total>
- Industry Commission, (1998), Final Report: State, Territory and Local Government Assistance to Industry, 23 February, di-*download* dari www.indcom.gov.au/inquiry/stateass/final/
- Khan, Azizur R. , (1993), Structural Adjustment and Income Distribution: Issues and Experience, International Labor Office, Geneva.
- Kwa, A. , (2000), "Will food security get trampled as the elephants fight over agriculture?", Focus on the Global South, di-*download* dari www.focusweb.org/publications/
- _____, (2001) World Bank and Food Security, Bank Information Centre, di-*download* dari <http://www.bicusa.org/ptoc/index.htm>

- Lakhan, V. Chris, A.S. Trenhaile & P.D. LaValle, (2000), "Environmental Protection Efforts in a Developing Country: the Case of Guyana", *Electronic Green Journal*, Issue 13, December, di-download dari egj.uidaho.edu/egj/lakhan1.html.
- Lang, T. and C. Hines, (1993), *The New Protectionism*, Earthscan, London.
- Lobe, J. , (2001), "Learn from Cuba, says World Bank", di-download dari <http://legalminds.lp.findlaw.com/list/ipe/msg03266.html>.
- Mervyn, E. King, (2001), "Corporate Governance, powerpoint presentation, part of the World Bank Institute's distance learning core course in Corporate Governance", di-download dari www.worldbank.org.
- Moberg, D. , (2000a), "World Bank Fires Stiglitz: The World Bank cuts its ties to the economist who became an unlikely hero to world trade protesters", *In These Times*, di-download dari www.salon.com, May 2.
- , (2000b) "Silencing Stiglitz", di-download dari www.salon.com/news/feature/2000/02/stiglitz.
- Right to Water, (2000), "Bolivia protests break water privatisation contract", di-download dari <http://hammer.prohosting.com/~penz/overseas/bolvh2o.htm>
- SAPRIN, (2000), "SAPRIN Challenges World Bank on Failure of Adjustment Programs", SAPRIN Secretariat and Executive Committee, di-download dari www.developmentgap.org/saprin/april 2000.html.
- Scoop, (2001), "Structure Confirmed for TVNZ", di-download dari www.scoop.co.nz/mason/stories/PA110/S00306.htm.
- Transparency International, (2001), "Helping Countries Reduce Corruption - the World Bank's Role", Bank Information Centre, di-download dari www.bicusa.org/ptoc/, September.
- Turk, D. , (1992) in IDIC (1993), *Basic Education: A Precondition for Sustainable Development*, International Development Information Centre di-download dari <http://www.acdi-cida.gc.ca/xpress/dex/dex9310.htm>, No. 93-10 November, 1993.
- UNCTAD, (1998), *Promoting and Sustaining SMEs Clusters and Networks for Development*, Issues paper by the UNCTAD Secretariat, TD/B/COM.3/EM.5/2, 26 June.
- , (2000), *World Investment Report 2000*, di -download dari www.unctad.org.
- UNDP, (2001a), *Human Development Report 2001*, United Nations Development Program, Oxford University Press, New York, di-download dari www.undp.org.
- UNDP, (2001b), "Human Poverty Profile and Index", di-download dari www.undp.org/hdro/hpprof.htm.

Watkins, K. , (1999), "ESAF Reform and the Poor", Oxfam Policy Papers, speech at IMF Global Forum, Washington, 24 September 1999.

Weeks, J. , (1997), "Analysis of the Demery and Squire Adjustment and Poverty Evidence", CDPR Discussion paper 0197, Centre for Development Policy and Research, London, di-download dari www.soas.ac.uk/centres/cdpr/

World Bank, (2000a), Project Appraisal Document on a Proposed Trust Fund for East Timor Grant in the Amount of US\$6.8 Million Equivalent and a Second Grant of US\$11.4 Million to East Timor for an Agriculture Rehabilitation Project, Rural Development and Natural Resources Sector Unit, Papua New Guinea/Pacific Islands Country Unit, East Asia and Pacific Region, June 14.

-----, (2000b), World Development Report, di-download dari www.worldbank.org/

-----, (2001), "Adjustment from Within: lessons from the Structural Adjustment Participatory Review Initiative", di-download dari <http://www.worldbank.org/research/sapri/>, a contribution to the second global SAPRI initiative, July 30-31.

-----, (1995), Bureaucrats in Business: the economics and politics of government ownership, World Bank, Washington DC., di-download dari <http://www.worldbank.org/html/extpb/Bureaucrats/burocrat.htm>

-----, (2001b), Projects, di-download dari <http://www4.worldbank.org/sprojects/browse.asp?cat=country&Coun=B>

-----, (2001c), World Development Report, di-download dari www.worldbank.org/

-----, (2001d) "Interesting World Bank Facts", World Bank Weekly Update September 10-14

World Bank Institute, (2001), "Corporate Governance and Strategy Distance Learning Core Course", Module 2, di-download dari www.worldbank.org/wbi/corpgov/core_course/module2.htm

World Commission on Dams, (2000), Dams and Development: a new framework for decision making, di-download dari <http://www.dams.org/>

Zhongli, Liu (1997), Statement by the Hon. Liu Zhongli , Governor of the Bank for the People's Republic of China, Press Release No 15, Board of Governors Meeting, World Bank and IMF, 23-25 September, Hong Kong, di-download dari <http://www.imf.org/external/am/speeches/pdf/pr15cne.pdf>.